

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pada konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁸

Menurut Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

Tahapan demi tahapan yang dimulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai kepada evaluasi akan diteliti dan disajikan dalam penelitian yang peneliti laksanakan di organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara), 65

⁹ Ibid, 66

B. Pendidikan Karakter

Sudut pandang terinternalisasi terhadap pola pikir dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai kaidah syari'ah. Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi dan disiplin keilmuan yang digunakan, diantaranya: Menurut D. Rimba, pendidikan adalah “Bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh.”¹⁰

Menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab.¹¹ Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Sudirman, pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap.¹² Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk

¹⁰ D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), 19

¹¹ Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern* (Jakarta: Grasindo, 2007), 80

¹² Sudirman N, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), 4

memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹³ Sedangkan secara terminologi, pengertian pendidikan banyak sekali dimunculkan oleh para pemerhati/tokoh pendidikan, di antaranya:

Menurut Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵

Intinya pendidikan selain sebagai proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya (olahrasa, raga dan rasio) untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Setelah kita mengetahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu diketahui selanjutnya

¹³ Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa), 14.

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 24

¹⁵ UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 74

adalah hakikat karakter sehingga bisa ditemukan pengertian pendidikan karakter secara komprehensif.

Istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad 18, terminologi karakter mengacu pada pendekatan idealis spiritualis yang juga yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif, dimana yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motivator dan dominisator sejarah baik bagi individu maupun bagi perubahan nasional. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti *to engrave* atau mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (*an individual's pattern of behavior ... his moral contitution*).

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “*Charakter*”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.¹⁶ karakter juga bisa diartikan

¹⁶ Abdul majid, Dian andayani, *Pedidikan karakter dalam perspektif Islam* (Bandung: Insan Cita Utama, 2010), 11

sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis.¹⁷

Ki Hadjar Dewantara memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti. Menurutnya budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang kemudian menimbulkan tenaga. Dari beberapa definisi karakter tersebut dapat disimpulkan secara ringkas bahwa karakter adalah sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis; sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral; watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak; sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan sampai menjelma menjadi tenaga.

Dari definisi yang telah disebutkan terdapat perbedaan sudut pandang yang menyebabkan perbedaan pada pendefinisian. Namun demikian, jika melihat esensi dari definisi-definisi tersebut ada terdapat kesamaan bahwa karakter itu mengenai sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang membuat orang tersebut disifati.

Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

¹⁷ Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan* (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), 1

(pendidik) untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain (peserta didik) sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berfikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter, diantaranya Lickona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis.

Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsure pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Thomas Lickona mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Lebih jauh, Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik karakter. Tiga hal itu dirumuskan dengan indah: *knowing, loving, and acting the good*. Menurutnya keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter baik itu.¹⁸

¹⁸ Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1992), 12-22.

Pendidikan Karakter menurut Albertus adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menhayati nilai-nilai yang dianggap sebagai baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesama dan Tuhan.¹⁹ Menurut Khan pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik.

Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budi harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing, dan membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan menarik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dihayati dalam penelitian ini adalah religius, nasionalis, cerdas, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong-royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas dan peduli.²⁰

Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu²¹ :

1. karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya

¹⁹ Albertus, Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 5.

²⁰ Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*, (Yogyakarta : Pelangi Publishing, 2010), 34.

²¹ Thomas Lickona, *Educating For Character*, Ibid. 12-22.

2. kemandirian dan tanggung jawab
3. kejujuran/amanah, diplomatis
4. hormat dan santun
5. dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-royong/kerjasama
6. percaya diri dan pekerja keras
7. kepemimpinan dan keadilan
8. baik dan rendah hati
9. karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik dengan menggunakan metode *knowing the good, feeling the good*, dan *acting the good*. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan/mencintai dan sekaligus melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa dimengerti, jika penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif anak mengetahui, karena anak tidak terlatih atau terjadi pembiasaan untuk melakukan kebajikan Menurut Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga Negara yang baik.

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik , dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat pendidikan

karakter dalam konteks pendidikan Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.²²

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik menjadi insan kamil. Pendidikan karakter juga dapat diartikan sebagai suatu system penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang sempurna.

C. Jenis-jenis Pendidikan Karakter

Ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu²³:

1. pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan kebenaran wahyu tuhan (konservasi moral).
2. pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa.
3. pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan).

²² Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 23-24

²³ Yahya Khan, *Pendidikan karakter*, 2

4. pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis)

D. Fungsi Pendidikan Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional fungsi pendidikan karakter adalah:

1. pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;
2. perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat;
3. penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat

E. Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter adalah:

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

2. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

F. Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang

harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut di atas, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa²⁴

NO	NILAI	DESKRIPSI
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agamanya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas,

²⁴ Suyadi, *Strategi Pembelajaran pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 8

		serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang

	Damai	lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

G. Organisasi

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Chester Barnard dalam organisasi itu adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.²⁵ Dengan demikian Barnard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur kekayaan dari suatu organisasi, antara lain:

²⁵ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*(Jakarta: Rajawali Pers,1983), 112

1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran.
2. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut.
3. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota lainnya.

Organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, kolektivitas tersebut berstruktur, terbatas dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektivitas-kolektivitas lainnya.²⁶ Menurut John D. Millet, organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama.²⁷ Sebagian demikian itu adalah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahapan-tahapan khusus dari suatu tugas bersama. Organisasi (organization) secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja.²⁸ Entitas sosial berarti terdiri atas dua atau lebih orang. Diarahkan oleh tujuan berarti dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

²⁶ Ibid, 117

²⁷ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 24

²⁸ Daft, Richard L, *Manajemen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 9

Pendapat lain tentang definisi organisasi menurut Scein menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.²⁹ Asas-asas organisasi berperan dua macam yaitu pertama sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien, dan peranan kedua sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi agar dapat berjalan lancar.

Atas dasar dua macam peranan tersebut dapatlah kiranya disusun definisi asas-asas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi dapat berjalan lancar. Di sini digunakan perkataan asas berlaku “sejauh mungkin” untuk menunjukkan bahwa asas-asas dalam ilmu sosial tidak berlaku mutlak. Sebaliknya apabila sama sekali diabaikan, organisasi akan mengalami kesulitan.³⁰

Pengorganisasian dalam kajian manajemen digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut:³¹

1. Cara manager merancang struktur formal untuk menggunakan sumber-sumber daya keuangan, fisik dan bahan baku, dan tenaga kerja organisasi yang paling efektif.
2. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasaan seorang

²⁹ Hardati, Puji, dkk, *Pengantar Ilmu Sosial* (Semarang: FIA UNNES, 2007), 57

³⁰ Sutarto, *Dasar-dasar*, 43

³¹ Sutomo. dkk, *Manajemen Sekolah (edisi revisi)*, (Semarang: UPT MKK UNNES,2009), 13

manager yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.

3. Hubungan-hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para karyawan.
4. Cara manager membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam organisasinya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas.

Uraian singkat beberapa cara pandang organisasi berlandaskan asas penelitian dan percobaan, atas dasar penelitian ini kemudian disusun berbagai asas organisasi, asas organisasi merupakan asas umum yang dapat diterapkan pada setiap organisasi apa pun. Asas organisasi berdasarkan cara pandang klasik yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut³²:

1. Asas pertama adalah perumusan tujuan dengan jelas. Dengan rumusan tujuan yang jelas berarti kebutuhan manusia baik jasmani maupun rokhani yang ingin dicapai dalam kerjasama itu benar-benar jelas akan memudahkan penentuan haluan organisasi, pemilihan bentuk organisasi, penentuan aktifitas apasaja yang akan dilakukan.
2. Asas kedua adalah departemenisasi, yaitu pembentukan satuan-satuan organisasi yang akan disertai beban kerja tertentu.
3. Asas ketiga adalah pembagian kerja, yaitu rincian serta pengelompokan aktifitas yang semacam atau erat hubungannya

³² Sutarto, *Dasar-dasar*, 289

satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu, atau rincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu.

4. Asas keempat adalah koordinasi, yaitu didalam organisasi harus ada keselarasan aktifitas antar satuan atau keselarasan tugas antar pejabat.
5. Asas kelima adalah pelimpahan wewenang, yaitu penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain.
6. Asas keenam adalah rentangan kontrol, yaitu jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu.
7. Asas ketujuh adalah jenjang organisasi yaitu tingkat-tingkat satuan organisasi yang disusun menurut kedudukannya dari atas kebawah dalam fungsi tertentu.
8. Asas kedelapan adalah satuan perintah, yaitu tiap-tiap pejabat hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang atasan tertentu.
9. Asas kesembilan adalah fleksibilitas, yaitu organisasi haruslah merupakan struktur organisasi yang muda dirubah untuk

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengganggu kelancaran aktivitas yang sedang berjalan.

10. Asas kesepuluh adalah berkelangsungan, yaitu tiap-tiap satuan organisasi harus memiliki sarana-sarana tertentu agar dapat melakukan aktivitas operasinya yang secara terus menerus.

11. Asas kesebelas adalah keseimbangan, yaitu tiap-tiap satuan organisasi harus diletakkan pada struktur organisasi sesuai dengan peranannya.

Sedangkan cara pandang hubungan kerja kemanusiaan atau yang dinamakan pula cara pandang perilaku, cara pandang neoklasik, cara pandang perilaku antar pribadi, cara pandang perilaku antar kelompok, cara pandang manusiawi. Menurut Elton Mayo, Roethlisberger, dan Whitehead menggambarkan hubungan kerja kemanusiaan dalam organisasi kurang lebih sebagai berikut³³:

1. Organisasi perusahaan merupakan sistem sosial seperti sistem teknik ekonomi. Sistem sosial ini menetapkan peranan individu dan menyusun norma yang mungkin bermacam-macam dalam organisasi-organisasi formal.
2. Individu tidak hanya terdorong oleh perangsang ekonomi, tetapi didorong pula oleh macam-macam factor social dan kejiwaan. Perilakunya dipengaruhi oleh perasaan, sentiment dan sikap.

³³ Ibid, 293

3. Kelompok kerja informal menjadi satuan yang berperanan dalam berbagai pertimbangan. Kelompok memiliki peranan penting dalam menentukan sikap dan perbuatan individu pekerja.
4. Pola kepemimpinan berdasarkan struktur formal dan kedudukan wewenang pada organisasi di bawah sudut pandangan tradisional diubah banyak sekali agar supaya mempertimbangkan faktor-faktor kejiwaan. Para penganut hubungan kerja kemanusiaan lebih menekankan pola kepemimpinan “demokratis” daripada “otokratis”.
5. Pendekatan kerja kemanusiaan umumnya menggabungkan pemuasan pekerjaan dengan produktivitas dan menekankan peningkatan pemuasan akan meningkatkan akan mengarah pada peningkatan efektivitas.
6. Hal itu penting guna mengembangkan saluran komunikasi yang efektif antara berbagai tingkat dalam pemberiaan informasi. Pengikutsertaan merupakan pendekatan penting pada hubungan kerja kemanusiaan.
7. Manajemen memerlukan kemahiran sosial sama efektifnya dengan kemahiran teknis.
8. Para anggota dapat didorong dalam organisasi untuk pemenuhan yang pasti akan kebutuhan-kebutuhan sosial kejiwaan.

Organisasi merupakan konsep sosiologi dalam hubungannya dengan individu, hal ini di dasarkan oleh beberapa pertimbangan³⁴:

1. Tanpa individu tak mungkin ada organisasi
2. Organisasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia

c. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kolektif maupun pribadi.

Meskipun model-model organisasi itu berbeda diantara masyarakat namun satu hal yang dapat diperhatikan adalah kesamaan atas beberapa karakteristik organisasi bahwa organisasi³⁵:

1. Mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia.
2. Mempunyai hubungan sekunder (impersonal).
3. Mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas.
4. Mempunyai kegiatan kerja sama pendukung.
5. Terintegrasi dalam system social yang lebih luas.
6. Menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya.
7. Sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

³⁴ Hardati, Puji, dkk. *Pengantar Ilmu Sosial*. (Semarang: FIA UNNES, 2007), 57.

³⁵ Liliweri, Alo. *Sosiologi Organisasi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 24.